
Peran Transparansi dan Derajat Otonomi Fiskal dalam Menentukan Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia

Annisa Fahira

Universitas Padjajaran

annisaafahira@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan meningkatnya keterlibatan pemerintah dalam kehidupan masyarakat, konsep akuntabilitas publik menjadi semakin penting. Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa layanan publik diberikan dengan cara yang dapat diterima, efisien, dan berkelanjutan. Penilaian kinerja pemerintah, khususnya yang terkonsentrasi pada tingkat daerah, menjadi semakin kontroversial di kalangan masyarakat umum. Untuk mengetahui variabel apa saja yang berdampak pada kinerja pemerintah daerah di Indonesia, artikel ini menganalisis data yang dikumpulkan dari 27 kotamadya di provinsi Jawa Barat antara tahun 2018 sampai 2021. Dengan menggunakan SPSS dan analisis regresi berganda, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang berdampak pada kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh transparansi dan derajat otonomi fiskal daerah.

Kata Kunci: Transparansi, Derajat Otonomi Fiskal, Kinerja Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

As the government's involvement in public life grows, the concept of public accountability takes on more significance. It is the responsibility of the government to ensure that public services are delivered in a way that is acceptable, efficient, and sustainable. Government performance assessments, particularly those that concentrate on the regional level, are becoming more and more controversial among the general population. To determine what variables impact the efficiency of Indonesian local governments, this article analyzes data gathered from 27 municipalities on the island of West Java between 2018 and 2021. Using SPSS and multiple regression analysis, this study takes a quantitative method to identify the elements that impact the performance of local government. The West Java Regional Government's financial performance is impacted by transparency and regional autonomy, according to study.

Keywords: Transparency, Degree Of Financial Autonomy, Government Financial Performance, Local Own-Source Revenue.

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintah secara umum dapat ditingkatkan melalui perbaikan tata kelola (Bupati Bengkalis, 2022). Pemerintah dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan memberikan layanan kepada publik dengan cara yang tepat, efisiensi biaya dan berkelanjutan, dimana pemerintah diharapkan dapat menunjukan

pertanggungjawaban dalam bentuk kinerja keuangan yang dapat diandalkan (Gourfinkel, 2022). Konsep Akuntabilitas publik menjadi semakin penting karena negara memiliki peran yang lebih besar dalam kehidupan publik daripada sebelumnya, serta demokrasi yang dianggap memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah diiringi dengan konsep transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas (Pelizzo & Stapenhurst, 2014).

Secara umum kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan melalui perbaikan tatakelola sebagaimana dijelaskan pada UU No.23 Tahun 2014 dan UU No.25 Tahun 1999 sebagai pedoman terkait tata kelola pemerintahan. Pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut merupakan langkah penting dalam proses desentralisasi di Negara ini karena desentralisasi memiliki dampak positif untuk kinerja pemerintahan yang lebih baik (Setiawan & Winarna, 2022). Salah satu karakteristik utama yang menunjukkan kapasitas suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah ialah derajat otonomi fiskal (Surachman & Handayani, 2020). Melalui optimalisasi proses otonomi daerah, pemerintah daerah mampu memanfaatkan potensi sumber pendapatan sebagai sumber pembiayaan utama. Dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber pendapatan tersebut, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran belanja daerah secara optimal, khususnya untuk kepentingan pelayanan publik. Namun, keberhasilan ini tidak datang tanpa tantangan bagi pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah memerlukan upaya besar untuk mencapai kemandirian finansial, yang tercermin dalam kemampuan pemerintah daerah menghasilkan sumber pendapatan yang memadai. Sejauh mana daerah dapat memenuhi kebutuhan belanja daerah dengan mengandalkan sumber pendapatan lokal mencerminkan tingkat kemandirian dan keberlanjutan kebijakan otonomi daerah (Suryana et al., 2021). Salah satu ukuran kesehatan fiskal suatu kota atau kabupaten adalah tingkat realisasi pajaknya. Provinsi Jawa Barat merupakan studi kasus yang menarik karena pendapatan daerahnya terus meningkat selama lima tahun terakhir (Badan Pusat Statistik, 2021).

Besaran PAD mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yang dinilai dari anggaran belanja modal dan dana alokasi umum, menurut penelitian (Tumija & Sinta, 2022). Artinya, PAD dapat menjadi penentu kinerja pemerintah. Sesuai PP no. 58 Tahun 2005, APBD disusun dengan memperhatikan potensi pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat hanya dapat didanai secara memadai jika pemerintah daerah berupaya meningkatkan PAD, sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan mereka. Namun PAD dan dana alokasi umum digunakan sebagai metrik dalam penelitian ini, dan Derajat Otonomi Fiskal mewakili kemandirian daerah. Studi ini menemukan bahwa derajat otonomi fiskal berhubungan dengan efisiensi pemerintah daerah.

Evaluasi kinerja pemerintah daerah sangat bergantung pada penganggaran keuangan yang transparan (Suwarsih & Ritonga, 2018). Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adiputra (2018) di Indonesia, skala dan kualitas keterbukaan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa semakin terbukanya pemerintahan akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Misalnya, (Darma, 2019) menemukan bahwa ketika masyarakat dan daerah bekerja sama untuk menjaga akuntabilitas satu sama lain, pemerintah menjadi lebih bersih, efisien, dan lebih mampu mengakomodasi kebutuhan warganya. dana yang dialokasikan kepada negara.

Tujuan utama studi ini adalah untuk memberikan bukti atas pernyataan yang dibuat mengenai hubungan antara otonomi fiskal pemerintah daerah dan transparansi serta keberhasilan keuangan mereka. Salah satu komponen baru dari penelitian ini adalah pembuatan prosedur pengumpulan data variabel transparansi dengan menggunakan data sekunder. Secara khusus, penelitian ini bermaksud untuk menambah pengetahuan

mengenai topik tata kelola pemerintah daerah dengan menyelidiki hubungan antara legitimasi (sebagai proksi keberhasilan dalam metrik keuangan) dan rasio efektivitas, yang merupakan indikator kinerja pemerintah daerah dalam kaitannya dengan kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini mungkin berguna bagi pemerintah daerah yang ingin menilai kinerja keuangan mereka sendiri, termasuk aspek-aspek seperti otonomi fiskal dan keterbukaan.

Generalisasi hasil penelitian ini dijelaskan oleh teori *stewardship*. Ketika manajer tidak memikirkan kepentingannya sendiri melainkan kepentingan organisasi, teori *stewardship* menjelaskan mengapa hal ini terjadi. (Puspita & Halimatusyadiah, 2021). Asumsi filosofis mendasar dari teori ini bertumpu pada kenyataan bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya, mampu mengambil tanggung jawab, jujur, dan memiliki standar moral yang tinggi. Artinya, menurut teori *penatalayanan*, manajer dapat bertindak secara bertanggung jawab jika menyangkut kepentingan publik. (Nurul, 2018). Penelitian ini menggunakan teori *stewardship* untuk menggambarkan pemerintah daerah sebagai entitas terpercaya yang dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah untuk kepentingan masyarakat dan melaksanakan tugasnya.

Keberhasilan keuangan pemerintah daerah *mfathengacu* pada sejauh mana pencapaian pemerintah daerah di bidang keuangan daerah, termasuk pendapatan dan belanja daerah (Tumija & Sinta, 2022). Memeriksa rasio efektivitas adalah salah satu cara untuk mempelajari kesehatan fiskal suatu daerah (Mahmudi, 2016). Rasio efektivitas kinerja pemerintah adalah salah satu metrik moneter untuk membandingkan perolehan pendapatan daerah aktual dengan peningkatan yang direncanakan. (Budianto et al., 2023).

Praktik pengungkapan informasi keuangan pemerintah secara publik dikenal dengan istilah *transparansi keuangan* di tingkat daerah (Salle, 2016). Masyarakat kini menuntut dan pemerintah merespons keterbukaan keuangan. (Adiputra et al., 2018) Hal ini disebabkan karena isu etika, korupsi dan penyimpangan administrasi serta akuntabilitas yang menjadi permasalahan tinggi di Indonesia (Annur, 2023). *Transparansi dan akuntabilitas* penting untuk tatakelola keuangan negara yang baik. Dengan *transparansi keuangan* yang baik, masyarakat dapat memantau pengelolaan keuangan daerah dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan efisien. Analisis *transparansi pengelolaan keuangan daerah* dapat diukur melalui tingkat aksesibilitas informasi dalam studi (Styles & Tennyson, 2007). yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia (Adiputra, 2018).

Derajat otonomi fiskal merujuk pada sejauh mana daerah memiliki kemandirian finansial dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya keuangannya (Harto et al., 2022). Dalam kerangka desentralisasi fiskal, derajat otonomi fiskal menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi apakah suatu daerah memiliki kemampuan dan wewenang dalam mencari sumber pendapatan sendiri, mengelolanya, dan mengalokasikannya untuk melaksanakan rencana kerja dan operasional pemerintahan (Surachman & Handayani, 2020). Dengan demikian, derajat otonomi fiskal mencerminkan sejauh mana kemandirian fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mengatur keuangan dan sumber pendapatannya, memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih bebas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam makalah ini melibatkan pengumpulan data dari 26 pemerintah daerah di Jawa Barat, Indonesia antara tahun 2018 hingga 2021 melalui dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda sebagai alat statistik

untuk menguji faktor penentu kinerja pemerintah daerah. Secara khusus, dua variabel independen dipilih: transparansi pemerintah daerah dan derajat otonomi fiskal, serta kinerja keuangan diukur dengan membandingkan pendapatan dengan target potensi pendapatan. Faktor-faktor ini dianalisis dengan menggunakan berbagai teknik ekonometri seperti statistik deskriptif dan analisis korelasi untuk menentukan dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan di wilayah ini dari waktu ke waktu.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel	Skala
Transparansi (X1)	Kebebasan untuk mengakses informasi keuangan yang terbuka dan jujur secara menyeluruh dari pemerintah kepada masyarakat untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah (Adiputra et al., 2018).	<ul style="list-style-type: none"> • 1½ jika website pemda bisa ditemukan di halaman pertama pencarian di google dengan mengetikkan nama pemda. • +1½ jika hanya diperlukan tiga klik atau kurang untuk melihat informasi keuangan dan non keuangan di situs web pemda. • +1½ jika data keuangan dan non keuangan dapat diunduh dalam berbagai format. • +1½ jika ada informasi keuangan dan non keuangan sebelumnya di situs web pemerintah daerah. Skor total tertinggi adalah 4, dan skor terendah adalah 1 	Ratio
Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (X2)	ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. (Surachman & Handayani, 2020)	$DOF = \frac{\text{realisasi PAD}}{\text{realisasi pendapatan daerah}}$	Ratio
Kinerja Pemerintah (Rasio Efektivitas)	Rasio efektivitas kinerja pemerintah adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Budianto, 2022).	$Kinerja = \frac{\text{realisasi PJD}}{\text{Anggaran PJD}}$	Ratio

Prosedur Penelitian

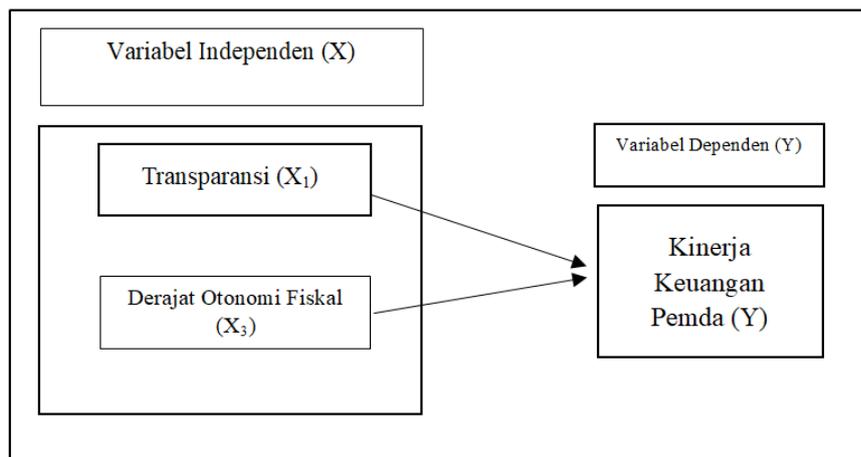
Dengan menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda, penelitian ini mengkuantifikasi kekuatan hubungan antar banyak variabel dan mengungkap arah hubungan antara variabel dependen dan independen. Pencarian statistik deskriptif dan analisis korelasi merupakan langkah awal dalam penyelidikan ini untuk menjamin bahwa data yang digunakan adalah normal dan tidak memihak, serta memberikan gambaran yang jelas tentang fakta penelitian. Lanjutkan ke uji koefisien regresi setelah Anda menyelesaikan uji asumsi klasik. Persamaan model regresi penelitian adalah sebagai berikut:

$$KINERJAY = a + b_1Trans_1 + b_2DOF_2 + \varepsilon \quad (1)$$

Informasi :

- KINERJAY : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- Trans₁ : Transparansi Keuangan daerah
- DOF₂ : Derajat Otonomi Fiskal
- ε : Standard error
- a : Constant

Hipotesis dan Kerangka Berpikir



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Pengaruh Transparansi Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi keuangan daerah dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah karena salah satu prinsip pengelolaan anggaran ialah keterbukaan dan akuntabilitas yang erat kaitannya dengan transparansi anggaran (Adiputra, 2018). Dalam konteks pemerintahan, hal ini berarti masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan anggaran daerahnya, seperti sumber pendapatan, alokasi anggaran, dan laporan keuangan (Kuntari et al., 2019). Dengan adanya transparansi anggaran masyarakat dapat memantau pengelolaan anggaran pemerintah daerah dan kinerja pemerintah daerah (Suwarsih & Ritonga, 2018)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam bidang ini. Agar pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan, pemerintah harus memberikan fakta finansial dan fakta relevan lainnya (Darma, 2019). Akses masyarakat terhadap informasi yang akurat dan non-diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan landasan prinsip transparansi yang bertujuan untuk menjaga hak asasi individu dan kolektif serta rahasia negara tanpa mengorbankan transparansi (Mahmudi, 2016). Pemerintahan

daerah yang lebih bersih, efektif, efisien, dan responsif—dan hasil keuangan yang lebih baik bagi pemerintah secara keseluruhan—dapat dicapai melalui tanggung jawab horizontal yang dipupuk oleh transparansi antara masyarakat dan pemerintah daerah (Darma, 2019).

H₁ : transparansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Derajat Otonomi Fiskal kinerja keuangan pemerintah daerah

Kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatannya, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, dapat ditunjukkan dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan daerah, yang merupakan ukuran kapasitas fiskal daerah (Bayage & Indrawati, 2015). (Setiawan & Winarna, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul *The Determinants of Local Government Performance* menegaskan bahwa tingkat otonomi fiskal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kinerja keuangannya.

H₂ : Derajat otonomi fiskal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks penelitian ini adalah 27 kabupaten dan kota yang membentuk Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan sumber sekunder antara lain website Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 dan website resmi pemerintah kabupaten/kota Jawa Barat. Jika Anda ingin mengetahui seberapa baik kinerja pemerintah daerah Anda, lihat saja kumpulan data ini, yang mencakup rincian realisasi anggaran seperti pendapatan dan belanja daerah. Sampel yang berjumlah 108 orang ini didasarkan pada informasi yang dikumpulkan dari 27 kabupaten berbeda selama empat tahun (2018–2021).

Statistik Deskriptif

Penelitian ini melihat bagaimana otonomi fiskal dan transparansi mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan memanfaatkan variabel-variabel tersebut sebagai variabel independen. Hasil pengujian deskriptif ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

<i>Variable</i>	<i>Obs</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Dev.</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>
Kinerja	108	0,8973	0,1731	0,4529	1,403
Transparansi	108	1,3425	0,3288	1,25	2,5
DOF	108	0,2316	0,1149	0,0669	0,509

Sumber : Hasil SPSS (Data diolah)

Berdasarkan tabel deskriptif statistik diatas diketahui bahwa nilai rasio efektivitas tertinggi terdapat pada Kota Sukabumi dengan nilai 1.40 pada tahun 2019, sedangkan nilai rasio efektivitas terendah terdapat pada kabupaten Pangandaran dengan nilai 0.45 pada tahun 2021.

Nilai rasio dari transparansi tertinggi terdapat pada Kabupaten Bekasi dengan nilai 2.50 pada tahun 2019 , sedangkan nilai rasio transparansi terendah terdapat pada Kabupaten Pangandaran dengan nilai 1.25 pada tahun 2021.

Nilai rasio dari derajat otonomi fiskal tertinggi terdapat pada Kota Bandung dengan nilai 0.51 pada tahun 2018, sedangkan nilai rasio derajat otonomi fiskal terendah terdapat pada Kabupaten Pangandaran dengan nilai 0.07 pada tahun 2020.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One sample Kolmogrov-Smirnov Test			
	Statistic	d.f	Asymp. Sig.(2-tailed)
Unstandardized residual	0,85	105	2,000

a. Lilliefors Significance Correction
 Sumber: Hasil Data Diolah (SPSS)

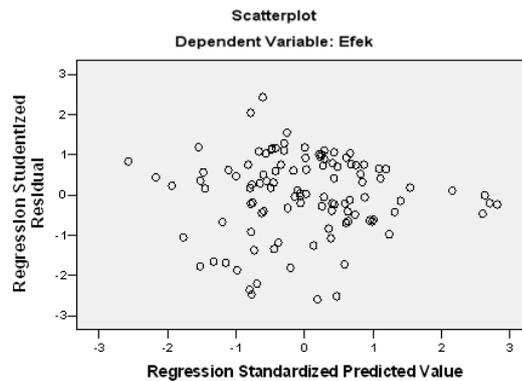
Uji normalitas yang memperhitungkan nilai Asymp adalah Uji Satu Sampel Kolmogorov-Smirnov. Sig (2-tailed) harus lebih besar dari 0,05 ($>\alpha$ 0,05). Hasil uji normalitas ditunjukkan pada tabel di atas, sehingga diketahui nilai signifikan Asymp. Dengan nilai Sig (2-tailed) sebesar 2,000 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data mengikuti distribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Transparansi	0,751	1,010
Derajat Otonomi Fiskal	0,742	1,010

a. Dependent Variable: Kinerja
 Sumber: Hasil Data Diolah (SPSS)

Mencari tahu apakah variabel-variabel independen berhubungan adalah inti dari uji multikolinieritas (Priyono, 2016). Model regresi yang kuat seharusnya tidak memiliki masalah multikolinieritas. Karena tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10, maka hasil uji multikolinieritas pada tabel 3 menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Hasil Data Diolah (SPSS)

Terlihat jelas dari diagram sebar sebelumnya bahwa titik-titik tersebut tersebar secara acak, baik di atas maupun di bawah nilai sumbu Y nol. Tidak ada bukti heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficient	t-Statistic	Sig.
Constant	-0,867	-1,311	0,000

Transparansi	1,704	5,783	0,000
DOF	1,022	2,231	0,003
Adjusted R ²	0,244		
<i>F-statistic</i>	18,240		0,000 ^b
<i>F-tabel</i>	2,69		

Sumber : Hasil Data Diolah (SPSS)

Berdasarkan Tabel 5 diketahui persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,876 + 1,704X_1 + 1,022 X_2 + 0,052 X_3 + e \quad (2)$$

Jika transparansi dan derajat otonomi anggaran tetap atau sama dengan nol, maka kinerja pemerintah daerah adalah -0,876 karena nilai konstanta adalah 0,876. Pada pemerintah Provinsi Jawa Barat, variabel Transparansi (X1) mempunyai pengaruh yang positif dan besar terhadap kinerja pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 1,704 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Jika semua hal dianggap sama, maka kinerja Pemprov Jabar akan meningkat sebesar 1.704 poin jika skor transparansinya naik satu satuan.

Variabel derajat otonomi fiskal (X2) mempunyai pengaruh positif dan besar terhadap kinerja pemerintah provinsi Jawa Barat yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,022 dan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Dengan asumsi seluruh faktor lainnya tetap, maka kinerja pemda akan meningkat sebesar 1,022 poin jika Pemprov Jabar memberikan kenaikan otonomi anggaran sebesar satu unit.

Uji F

Untuk mengetahui apakah model cocok dengan variabel independen digunakan uji F. Temuan uji F menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh teknik pengelolaan keuangan, investasi pemerintah, dan pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Fakta bahwa *F*hitung (18,240) lebih besar dari *F*tabel (2,69) membuktikan bahwa model tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara simultan adalah buktinya.

Uji Koefisien Determinasi

Untuk melihat seberapa besar variansi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen, dapat digunakan koefisien determinasi R². Pada tabel regresi terlihat nilai Adjusted R² atau Adjusted R-squared sebesar 0,244. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan 24% variabel dependen, dan sisanya sebesar 80% disebabkan oleh variabel di luar model.

Pembahasan

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Analisis transparansi penelitian ini menemukan nilai sebesar 1,704 dengan tingkat signifikansi 0,00, yang menunjukkan bahwa keterbukaan secara signifikan meningkatkan efisiensi pemerintah dalam menangani keuangannya. Penelitian (Darma, 2019) mendukung klaim ini; penulis berpendapat bahwa pemerintahan yang terbuka membuat pejabat lebih akuntabel, khususnya di negara demokrasi (Darma, 2019). Dalam sistem di mana masyarakat menaruh kepercayaan mereka pada pemerintah dalam menangani keuangan mereka, keberhasilan atau kegagalan kepercayaan tersebut secara langsung berkaitan dengan seberapa baik kinerja lembaga pemerintah yang diberi tanggung jawab tersebut. Dalam hal pemberantasan korupsi, kesalahan pengelolaan dana publik, dan penguatan peran pengawasan pemerintah, keterbukaan merupakan salah satu komponen yang dapat

mendorong kinerja (Adiputra et al., 2018). Selain itu, menurut temuan mereka, lembaga pemerintah akan lebih efektif jika bersikap terbuka dan jujur kepada publik (Puspita et al., 2021). Temuan lain dari studi mereka adalah bahwa SKPD berkontribusi terhadap transparansi kinerja pemerintah dengan mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui media secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan. Informasi ini juga dibuat mudah diakses oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan haknya (Putra et al., 2022)

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa untuk mencapai kesejahteraan sosial, pemerintah harus menjadi lembaga yang jujur dan warga negara harus memiliki kepercayaan terhadap lembaga pemerintah (Adiputra et al., 2018)

Pengaruh Derajat Otonomi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Nilai t sebesar 1,022 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 menunjukkan bahwa derajat otonomi fiskal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah, sesuai dengan temuan penelitian ini tentang pemeriksaan Derajat Otonomi Fiskal. Bayage (2015) dan Dermawan (2018) menemukan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat dipengaruhi oleh derajat otonomi fiskal (Dof) yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah.

Menurut teori *stewardship*, yang mempertimbangkan tren menuju tanggung jawab dan transparansi yang lebih besar, kinerja keuangan daerah yang lebih kuat sejalan dengan otonomi fiskal yang lebih besar. Otonomi fiskal memperkuat rasa kepemilikan dan komitmen para pejabat terhadap wilayah mereka, mendorong penggunaan sumber daya secara bijaksana dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab (Goeminne & George, 2019; Permana & Rahardjo, 2022). Keseluruhannya, penerapan otonomi fiskal dalam semangat *stewardship* tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan daerah, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan warganya, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kemakmuran berkelanjutan (Guga, 2018; Setiawan & Winarna, 2022).

KESIMPULAN

Transparansi dan otonomi fiskal berdampak pada kinerja keuangan Pemda Jabar, menurut penelitian ini. Temuan ini memberikan kepercayaan terhadap gagasan yang dikemukakan oleh teori *stewardship*, yang menyatakan bahwa otonomi fiskal, dengan meningkatkan dedikasi pejabat terhadap daerahnya, dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Otonomi fiskal diperkirakan akan mendorong penggunaan dana secara bijaksana, meningkatkan efektivitas belanja publik, dan memperkuat ikatan antara negara dan penduduknya. Penelitian ini hanya mengamati satu provinsi, sehingga penelitian selanjutnya sebaiknya membandingkan provinsi-provinsi yang berbeda untuk memperluas cakupannya dan memasukkan variabel-variabel lain seperti rasio keuangan, rasio ketergantungan, dan rasio keselarasan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah dan seberapa baik hal tersebut mendukung kinerja pemerintah yang lebih baik.

REFERENSI

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Annur, C. M. (2023, March 9). Ada 1.351 Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Sepanjang 2004 hingga 2022. *Katadata Media Network*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistics of Jawa Barat*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Bayage, N., & Indrawati, N. K. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Era Otonomi Daerah di Kabupaten Malang (Studi Kasus Di Kabupaten Malang Jawa Timur Tahun Anggaran 2009- 2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2).
- Budianto, A., Rozi, A., Tanjung, F. S., Marnas, M., & Andriani, B. F. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Bank Rakyat Indonesia Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Studi Komparatif. *Jurnal Maneksi*, 12(1), 163–169. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i1.1360>
- Bupati Bengkalis . (2022). Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis . Bengkalis Provinsi Riau .
- Darma, N. D. A. (2019). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Dermawan, W. D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5(2), 153–156. <https://doi.org/10.25157/je.v5i2.963>
- Goeminne, S., & George, B. (2019). New Development: Determinants of Financial Performance in Public Organizations. *Public Money & Management*, 39(1), 70–73. <https://doi.org/10.1080/09540962.2018.1476309>
- Gourfinkel, D. (2022). The Main Challenges of Public Sector Accounting reforms and World Bank’s Public Sector Accounting and Reporting (PULSAR) Program. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(2), 347–352. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-2021-0079>
- Guga, E. (2018). Local Government Modernization in Albania. *International Journal of Public Sector Management*, 31(4), 466–506. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-01-2017-0018>
- Harto, P., Utami, I., & Wardhani, R. S. (2022). Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat. *Owner*, 6(4), 3804–3814. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1165>
- Kuntari, Y., Chariri, A., Prabowo, T. J. W., & Nurdhiana. (2019). The Influence of Local Tax, Local Retribution, and Audit Opinion on Expenditure Performance in Local Governments Central Java Province, Indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(6), 1172–1181. <https://doi.org/10.18510/HSSR.2019.76167>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (3rd ed.). UPP AMP YKPN.
- Pelizzo, R., & Stapenhurst, F. (2014). *Government Accountability and Legislative Oversight*. Routledge.

- Permana, D. Y., & Rahardjo, S. N. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–10. <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i2.3603>
- Puspita, D., Fadli, & Halimatusyadiah. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Seluma. *Jurnal Fairness*, 10(2), 79–88. <https://doi.org/10.33369/fairness.v10i2.15247>
- Putra, D. D., Rantelangi, C., & Diyanti, F. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 7(1), 34–44. <https://doi.org/10.29264/jiam.v7i1.8966>
- Salle, A. (2016). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1(1).
- Setiawan, D., & Winarna, J. (2022). The Determinants of Local Government Performance. *Quality: Access to Success*, 23(186), 93–97. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.186.12>
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). J. of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. *J. Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1), 56–92.
- Surachman, E. N., & Handayani, D. (2020). *Modul Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Politeknik Keuangan Negeri STAN.
- Suryana, N. A., Putra, S. S., & Rosmiati, M. (2021). Review Alokasi pada Anggaran Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2020. *Indonesian Accounting ...*, 1(3), 405–414. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/3011>
- Suwarsih, A., & Ritonga, I. T. (2018). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Di Sumatra. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28. <file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf> <http://salud.tabasco.gob.mx/content/revista> http://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf <http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060> <http://www.cenetec>.
- Tumija, T., & Sinta, G. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap. *JEKP: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 9(2), 61–78. <https://doi.org/10.33701/jekp.v9i2.2806>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
